

# Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk Membentuk Sikap dan Prilaku Demokratis

Meza Aulia Zahrah<sup>a,1</sup>, Emilia Susanti<sup>b,2</sup>, Reva Nur Amalya<sup>c,3</sup>, Yuli Kartika Putri<sup>d,4</sup>, Endha Istiqomah<sup>e,5</sup>, Andini Putri<sup>f,6</sup>

<sup>a, c, d, e, f</sup> Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Riau

<sup>b</sup> Dosen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Riau

<sup>1</sup>[mezaauliazahrah@gmail.com](mailto:mezaauliazahrah@gmail.com), <sup>2</sup>[emilia.susanti067@gmail.com](mailto:emilia.susanti067@gmail.com), <sup>3</sup>[amalyareva@gmail.com](mailto:amalyareva@gmail.com),

<sup>4</sup>[yulikartikaputri803@gmail.com](mailto:yulikartikaputri803@gmail.com), <sup>5</sup>[endhaistiqomah845@gmail.com](mailto:endhaistiqomah845@gmail.com), <sup>6</sup>[andiniputrii865@gmail.com](mailto:andiniputrii865@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 4 Maret 2024

Direvisi: 17 April 2024

Disetujui: 20 Mei 2024

Tersedia Daring: 1 Juni 2024

*Kata Kunci:*

Pendidikan

Demokrasi

Prilaku Demokratis

## ABSTRAK

Demokrasi sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi mengajarkan kita bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan dan bahwa mereka menciptakan peraturan yang baik dan melindungi hak-hak mereka. Namun, saat ini terjadi banyak pelanggaran demokrasi. Banyak masyarakat yang belum memahami sikap dan perilaku demokratis sehingga menyebabkan kesenjangan. Masyarakat belum cukup matang untuk mengikuti dan menyikapi proses demokrasi karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang demokrasi. Tujuan dari penulisan jurnal kali ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Pentingnya Pendidikan Demokrasi untuk Membentuk Sikap dan Perilaku yang Demokratis. Metode penelitian kali ini menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur. Hasil yang didapatkan bahwa Pendidikan demokrasi memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan membantu menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Pendidikan demokrasi menanamkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dapat membentuk masyarakat yang perilakunya mencerminkan kehidupan demokratis.

## ABSTRACT

*Keywords:*

Education

Democracy

Democratic Behavior

*Democracy is very important for the life of the nation and state. Democracy teaches us that the people are the source of power and that they create good rules and protect their rights. However, currently there are many violations of democracy. Many people do not understand democratic attitudes and behavior, which causes inequality. Society is not yet mature enough to follow and respond to the democratic process due to a lack of socialization and education about democracy. The purpose of writing this journal is to provide an understanding of the Importance of Democratic Education to Form Democratic Attitudes and Behavior. This research method uses the library method or literature study. The results obtained show that democratic education has the ability to provide education and help solve the problems of the nation and state. Democratic education instills democratic principles so that it can form a society whose behavior reflects democratic life.*

©2024, Meza Aulia Zahrah, Emilia Susanti, Reva Nur Amalya, Yuli Kartika Putri, Endha Istiqomah, Andini Putri

This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Demokrasi sangat penting untuk kehidupan bangsa dan negara. Demokrasi didasarkan pada suara rakyat, Dunia saat ini melihat pertumbuhan demokrasi yang sangat pesat. Para konstitusionalis dan politisi berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat karena memberikan kesempatan kepada rakyat sebesar mungkin untuk berpartisipasi atau berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Demokrasi memungkinkan pemerintahan negara untuk berubah sesuai dengan situasi dan aspirasi masyarakat.

Dalam beberapa negara, krisis demokrasi telah menjadi masalah besar. Ini dapat terjadi karena kurangnya partisipasi politik, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi, dan peningkatan otoritarianisme. Banyak masyarakat, terutama generasi muda tidak sadar politik. Mereka mungkin tidak menyadari betapa pentingnya berpartisipasi dalam politik untuk menentukan masa depan mereka dan negara mereka.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, arus informasi yang cepat dapat menjadi baik dan buruk. Informasi semakin mudah diakses, tetapi hal ini juga menimbulkan masalah baru, seperti penyebaran berita palsu dan polarisasi opini. Ini dapat meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik serta mengancam stabilitas demokrasi.

Selain itu, akses yang tidak merata terhadap pendidikan demokratis merupakan kendala yang signifikan dalam proses membangun masyarakat demokratis. Akses ke pendidikan demokratis seringkali terbatas di banyak tempat, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Ini disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai, tenaga kerja yang tidak memadai, dan sistem pendidikan yang tidak dapat memasukkan materi tentang pendidikan demokratis ke dalam kurikulum sekolah.

Di era polarisasi politik dan kesenjangan yang semakin meningkat, pentingnya pendidikan demokratis menjadi semakin jelas. Pendidikan demokratis mencakup pemahaman tentang struktur politik dan keterampilan emosional dan sosial yang diperlukan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Hal ini membantu menumbuhkan rasa toleransi, inklusi, dan penghormatan perbedaan, yang merupakan sifat penting untuk masyarakat yang efektif.

Dari perspektif ini, penelitian lebih lanjut tentang peran pendidikan demokrasi dalam pembentukan sikap dan perilaku demokratis sangatlah relevan dan mendesak. Dengan memahami lebih lanjut tentang kesulitan yang dihadapi dalam membangun masyarakat demokratis, kita dapat menemukan cara terbaik untuk meningkatkan pendidikan demokrasi dan mendorong sikap dan perilaku kekuatan demokrasi yang kuat.

## 2. Metode

Penelitian ini telah direncanakan dengan cermat dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian tindakan yang terkait dengan penelitian kepustakaan, termasuk membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2008: 3). Untuk mendapatkan data penelitian, penelitian ini mengacu pada literatur yang berbeda dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penulis mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini yang berfokus pada penjelasan dan interpretasi fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam konteks tertentu. Tujuan ulasan kali ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang peran pendidikan demokrasi dalam menumbuhkan sikap dan tindakan demokratis. Berikut langkah-langkah metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini antara lain:

- a. Memilih sumber pustaka, Sumber literatur untuk penelitian dipilih dengan memastikan bahwa sumber tersebut sesuai atau relevan dengan subjek, tema, atau ide penelitian.

- b. Menelusuri sumber pustaka, Sangat penting untuk menampilkan kutipan dan memastikan apakah sumber pustaka benar.
- c. Membaca Sumber Pustaka, Pembacaan langsung sumber pustaka akan membantu mendapatkan pemahaman baru dan membangun atau membentuk kerangka teori yang akan membantu proses penulisan.
- d. Melakukan pencatatan, Saat meninjau sumber perpustakaan catat hal-hal penting untuk lebih efektif dan menghemat waktu saat melakukan pengecekan silang.
- e. Penyajian kajian pustaka, Setelah semua data dikumpulkan, ulasan terakhir adalah deskripsi kajian pustaka yang sudah diolah dengan menggunakan bahasa pribadi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis (bahasa), demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang berarti “rakyat” dan cratos/cratein yang berarti “pemerintahan” atau “kekuasaan”. Secara bahasa, demokrasi adalah “pemerintahan rakyat” atau “kekuasaan rakyat” (Juliardi, 2017). Sedangkan, dari segi terminologi, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah rencana kelembagaan untuk mengambil keputusan politik di mana individu diberi wewenang untuk memutuskan bagaimana bersaing berdasarkan suara terbanyak (Schumpeter, 1950).

Demokrasi berasal dari Yunani kuno dan berkembang dalam kehidupan nasional pada abad ke-4 SM. Pada abad ke-6 SM, ia digunakan dalam politik nasional, dan terus dipraktikkan sampai abad ke-6 SM. Pada saat itu, demokrasinya adalah demokrasi langsung, di mana seluruh warga negara memiliki suara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Pada saat itu, Yunani adalah negara kota (polis) dengan populasi kurang lebih 300.000 orang yang terbatas pada satu kota dan sekitarnya. Ada batasan meskipun semua warga negara terlibat. Misalnya, perempuan, anak-anak, dan budak dilarang terlibat dalam aktivitas pemerintahan (Susanti, 2019: 50).

Samuel Huntington menjelaskan bahwa sistem politik bersifat demokratis karena masyarakat dapat memilih dengan bebas dan hampir semua warga negara dewasa mempunyai hak untuk memilih. Pengambil keputusan kolektif yang paling berkuasa dalam sistem ini dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan teratur (Susanti, 2019: 51).

Pengetahuan normatif dan empiris dapat berkontribusi pada kemajuan demokrasi Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memberikan dasar untuknya. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa "Maka berdirilah kemerdekaan nasional Indonesia. dalam Konstitusi yang dirumuskan." Negara Indonesia dibentuk dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan pada rakyat. Tanda ini juga mengandung bukti normatif. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dengan menyatakan bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan harus dihormati." Selain itu, Pasal 28 menegaskan bahwa "Kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat dan berpikir secara lisan" dan bahwa "Kedaulatan juga harus dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi."

Dalam demokrasi terdapat model model didalamnya, berikut terdapat dua model demokrasi yang dalam prakteknya akan membawa makna bagi semua warga negara:

#### 1. Presidensial dan Parlementer

Dalam demokrasi presidensial, presiden memiliki otoritas politik yang kuat dan otoritas pengambilan keputusan. Sistem pemerintahan yang dikenal sebagai sistem presidensial bergantung pada peran presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Pemerintahan presidensial memiliki banyak fitur. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif lebih kuat daripada legislatif.

#### 2. Demokrasi Perwakilan dan Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung, juga dikenal sebagai demokrasi murni, adalah jenis demokrasi di mana orang-orang menjalankan kekuasaannya secara langsung tanpa menggunakan parlemen, perwakilan, atau perantara. Demokrasi ini memerlukan partisipasi politik yang luas.

Ketika suatu pemerintah perlu mengeluarkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturannya ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada isu-isu dan membantu menentukan nasib negara.

Dilihat dari paham yang dianut demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Demokrasi Liberal

Negara-negara Barat menggunakan sistem pemerintahan ini, yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu untuk bergerak, berpikir, dan berbicara. Meskipun kesetaraan diprioritaskan dalam politik, persaingan bebas masih lazim dalam ekonomi. Ini menciptakan perbedaan antara buruh (kelompok ekonomi lemah) dan kapitalis (kelompok ekonomi kuat).

2. Demokrasi Sosialis

Negara-negara yang menganut demokrasi sosialis menekankan konsep kesetaraan dan menghilangkan perbedaan kelas sosial. Akibatnya, hak individu tidak ada di negara-negara sosialis yang ada adalah hak kolektif atau umum.

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila berpusat pada kekeluargaan dan gotong royong untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Mengandung elemen kesadaran beragama berdasarkan kebenaran, kasih sayang, dan keluhuran budi pekerti, serta individualitas dan keberlanjutan budaya Indonesia.

Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengatur diri mereka sendiri, yang merupakan ciri dari negara demokrasi. Salah satunya adalah otonomi wilayah, Otonomi ini memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk mengendalikan dirinya sendiri dari pemerintah pusat. Menurut Bingham Power Jr. (Susanti 2019), ciri-ciri negara demokrasi termasuk legitimasi pemerintahan, peraturan di negara dengan minimal dua partai politik, hak pilih setiap warga, dan perlindungan rahasia setiap warga. warga negara merasa aman dalam hal kebebasan, demokrasi, dan ekonomi setelah pemilu.

## B. Pengertian Pendidikan Demokrasi

Masyarakat belajar (*learning society*) memiliki karakteristik khusus. Memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk berkembang dan belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sepanjang tidak melanggar landasan negara dan masyarakat. Kebebasan masyarakat untuk memilih dan memenuhi kebutuhan belajarnya sejalan dengan semangat demokrasi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan demokrasi pada dasarnya bertujuan untuk mendidik siswa menjadi warga negara demokratis melalui sosialisasi dan transformasi nilai-nilai demokrasi serta pengembangan perilaku yang dapat mencerminkan kehidupan negara dan masyarakat demokratis. Tujuan utama pendidikan demokrasi adalah untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang mampu berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kesadaran mereka. ada dua hal yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi merupakan proses pembelajaran sosial yang terjadi secara bertahap dan tidak serta merta dapat ditiru oleh kelompok sosial lainnya.
2. Keberlangsungan kehidupan demokrasi bergantung pada kemampuan dan keberhasilan masyarakat itu sendiri dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi (kebebasan, kesetaraan, keadilan) dan kesetiaan anggotanya terhadap lembaga politik

demokrasi (Shihono, 2011). Salah satu ciri pendidikan demokratis adalah fokusnya pada pengajaran keterampilan dan nilai-nilai kewarganegaraan.

Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga negara untuk bertindak dan bersikap secara demokratis melalui kegiatan yang menanamkan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda:

1. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan dari pendidikan nasional, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk mengembangkan keterampilan dan menghasilkan warga negara yang berharga yang mampu mengembangkan pendidikannya dengan sadar untuk mewujudkan potensi dirinya dengan membentuk karakter dan peradaban masyarakat untuk berkembang. Jadikan pengikutmu orang yang beriman dan bertakwa. Ya Tuhan, akhlakmu luar biasa. Menjadi individu yang sehat, berpengetahuan, berbakat, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

2. PKn sebagai Pendidikan Demokratis

Untuk memenuhi misi pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi mata pelajaran sekolah dan mata pelajaran universitas di masa depan. Karena pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pemerintahan demokratis, persyaratan seperti itu secara teoritis tidak salah. Pendidikan demokratis dapat dimasukkan ke dalam bidang studi yang berbeda, seperti sejarah, kewarganegaraan, atau kelompok ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dapat dianggap sebagai mata pelajaran independen. Dengan demikian, pendidikan demokrasi dapat dikategorikan sebagai bidang akademik tersendiri. Sekolah pernah mengajar mata pelajaran sosial. Tetapi saat ini, kewarganegaraan harus didefinisikan dan dibatasi pada pendidikan demokratis di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat berfungsi sebagai pendidikan demokrasi (Winarno 2014).

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilaksanakan baik secara informal, formal, maupun nonformal. Secara informal, pendidikan demokrasi dapat berlangsung di lingkungan rumah yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Sekolah menyelenggarakan pendidikan formal dan demokratis baik dalam format sekolah maupun luar sekolah. Pendidikan demokrasi informal saat ini berlangsung di kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan media.

Program pendidikan demokrasi berkaitan dengan dua hal yaitu, desain sekolah dan materi pelajaran. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi pendidikan. Perjanjian ini menyangkut penggabungan pendidikan demokratis ke dalam kegiatan kurikulum negara, baik secara eksplisit dimasukkan dalam mata pelajaran atau kursus atau dimasukkan ke dalam mata pelajaran umum. Prinsip pemerintahan demokratis berbasis aturan di rendah maka dari itu Pendidikan kewarganegaraan kemudian berperan penting dalam membangun budaya pemerintah.

### **C. Pentingnya Pendidikan Demokrasi untuk Muwujudkan Sikap dan Prilaku Demokratis**

Pendidikan dan demokrasi adalah dua komponen penting dalam membentuk masyarakat yang berbudaya demokrasi, keduanya saling memperkuat dan bergantung satu sama lain. Mereka berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk kemajuan sosial dan politik bangsa. Di bawah ini adalah beberapa contoh bagaimana pendidikan dan demokrasi berhubungan erat:

1. Penggunaan pendidikan untuk mengubah kebudayaan masyarakat



Pendidikan tidak dapat terpisah dari masyarakat secara politik dan budaya. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi masyarakat untuk mengubah budaya dan negaranya menjadi lebih baik tanpa pendidikan.

2. Penguasaan negara melalui pendidikan

Sistem pendidikan memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat karena memiliki kemampuan untuk mendorong orang untuk berpikir lebih terbuka. Semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi institusi pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut memiliki sikap demokratis, rasa persatuan, dan rasa nasionalisme atau persatuan bangsa. Publik mengkritik kebijakan pemerintah.

3. Tujuan pendidikan independen yang berkaitan dengan negara demokratis

Kebebasan adalah dasar pendidikan demokrasi. Sebaliknya, pendidikan demokratis bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kemiskinan, kebodohan, dan bentuk perbudakan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi pendidikan, yang adalah memberikan kebebasan individu dalam masyarakat melalui otonomi lembaga pendidikan pemerintah dan swasta.

Demokrasi tidak hanya memerlukan masyarakat yang memiliki sifat dan perilaku demokratis, tetapi juga memerlukan kondisi kehidupan di mana warga negara memiliki dan dapat mempertahankan nilai-nilai demokratis. Perilaku atau sikap demokratis didefinisikan sebagai perilaku, tindakan, perasaan, dan pendapat seseorang yang mempertahankan kesetaraan dan menghargai pendapat, pertimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab orang lain. Banyak sekali sikap dan perilaku demokratis yang harus di tumbuhkan dalam diri masyarakat, yaitu :

1. Menghormati Hak Asasi Manusia
2. Toleransi terhadap perbedaan
3. Partisipasi politik yang aktif
4. Menerima keputusan mayoritas
5. Menghargai kebebasan pers dan informasi
6. Membangun dialog dan kompromi
7. Menghormati pemisahan kekuasaan
8. Menghormati hukum

Ketika masyarakat mengadopsi sikap dan tindakan demokratis, mereka akan menciptakan suatu lingkungan di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial serta mendapatkan perlindungan yang sama. Tentu saja, mencapai dan mengembangkan sikap dan perilaku demokratis di masyarakat memerlukan proses yang sulit dan waktu yang tidak singkat. sehingga pendidikan demokrasi jangka panjang adalah upaya untuk mencapai dan mengembangkan sikap dan perilaku demokratis di masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberian pendidikan demokrasi kepada masyarakat tentu saja tidak bisa berjalan mulus, terdapat tantangan-tantangan yang mungkin terjadi dan menghambat pelaksanaan pendidikan demokrasi. Tantangan-tangan tersebut antara lain:

1. Ketidakseimbangan Akses, banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal maupun non-formal.
2. Kurikulum yang terbatas, kurikulum pendidikan formal sering kali tidak memberikan penekanan yang memadai pada pendidikan demokrasi. Hal ini adapat mengurangi kesempatan siswa untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi dan keterlibatan politik yang aktif.

3. Polarisasi dan Konflik Sosial, Polarisasi politik dan konflik sosial dapat menghambat upaya pendidikan demokrasi dengan menghalangi dialog yang konstruktif dan merusak kepercayaan pada proses politik.
4. Kurangnya Pelatihan Guru, Banyak guru tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam mengajar pendidikan demokrasi, sehingga sulit bagi mereka untuk menyampaikan materi tersebut secara efektif.
5. Tantangan Teknologi dan Media Sosial, Penyebaran misinformasi dan polarisasi opini melalui media sosial dapat membingungkan siswa dan masyarakat umum tentang prinsip-prinsip demokrasi dan proses politik.

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan semua orang memiliki akses yang sama ke pendidikan demokratis. Selain itu, kurikulum sekolah formal harus diubah untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada pendidikan demokrasi, termasuk memasukkan materi tentang demokrasi ke dalam mata pelajaran yang ada.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan keterlibatan politik, program pendidikan informal seperti kelompok diskusi masyarakat, seminar, dan lokakarya dapat digunakan. Pelatihan guru yang lebih baik juga diperlukan untuk mengajar pendidikan demokrasi. Ini mencakup pengetahuan tentang cara mengatur diskusi inklusif dan teknik pengajaran interaktif. Untuk membantu siswa dan masyarakat memahami dan mengevaluasi informasi yang mereka terima dari media sosial, kurikulum sekolah harus mencakup literasi digital dan literasi media.

Hasilnya adalah ketika setiap warga negara mendapat pendidikan yang memadai tentang demokrasi, mereka akan lebih terlibat dalam proses politik, lebih mampu memilih informasi yang benar, lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, dan lebih mampu bertindak dalam kehidupan sehari-hari. . untuk demokrasi. Fondasi seluruh demokrasi diperkuat.

#### **4. Kesimpulan**

Pendidikan demokrasi sangat penting untuk membentuk sikap dan perilaku demokratis dalam masyarakat. Ini membantu masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi, belajar berpikir kritis, dan belajar menghormati kebebasan pers dan hak asasi manusia. Pendidikan demokrasi akan membantu membangun masyarakat yang inklusif, berpartisipasi, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Pendidikan demokratis juga meningkatkan pemahaman warga negara tentang proses politik, hak dan tanggung jawab mereka, serta pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan pendapat. Pendidikan demokratis mengajarkan orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk debat publik, pemilihan umum, dan mendukung perubahan sosial. Ini pasti akan memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh dan memberikan landasan untuk pembangunan masyarakat yang demokratis, egaliter, dan adil.

Pendidikan akan mempromosikan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keadilan, dan transparansi. Jika orang tahu apa itu demokrasi, mereka akan tahu betapa pentingnya melindungi kelompok minoritas, menghormati hak asasi manusia, dan bekerja untuk membuat pemerintah bertanggung jawab. Ini semua membentuk landasan yang kokoh untuk kelangsungan sistem demokrasi yang kuat dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi mencakup pemahaman yang bukan hanya tentang struktur politik, tetapi juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menghancurkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan demokratis tidak hanya berdampak pada kehidupan seseorang, tetapi juga membentuk jalan dan kualitas negara. Dengan masyarakat yang terdidik secara demokratis, kita dapat mengharapkan kurangnya konflik dan kesenjangan, partisipasi yang lebih aktif dalam proses politik, dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan responsif. Ini adalah langkah besar menuju masyarakat yang adil dan berkelanjutan, setiap orang memiliki kesempatan dan suara yang sama untuk membentuk masa depan kita bersama.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyelesaikan jurnal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi yang telah bekerja keras untuk mereview, mengedit, dan menerbitkannya. Kemudian Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga pendidikan, universitas, dan lembaga penelitian lainnya yang telah memberikan bantuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tinjauan ini.

## 6. Daftar Pustaka

- Al Hakim, Suparlan Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Alfionita, Ninda. (2015). Pentingnya Pendidikan Demokrasi Bagi Terlaksananya Nilai-Nilai Demokrasi Indonesia. [https://nindaalfionita10.wordpress.com/2015/05/21/pentingnya-pendidikan-demorasi-bagi-terlaksananya-nilai-nilai-demokrasi-di-indonesia/?e\\_pi=7%PAGE\\_ID10%2C928225402](https://nindaalfionita10.wordpress.com/2015/05/21/pentingnya-pendidikan-demorasi-bagi-terlaksananya-nilai-nilai-demokrasi-di-indonesia/?e_pi=7%PAGE_ID10%2C928225402).
- Alfitri, Rogaiyah. (2009). *Jurnal PPKn & Hukum: Demokrasi Indonesia. Vol 4*.
- Damanik et al Memahami Jati Diri Bangsa, T., Damanik, T., Fransiska Hutagalung, C., Wibowo, D., Friska Tinambunan, I., Enjelina Sigalingging, D., & Nababan, R. (2023). Memahami Jati Diri Bangsa: Peran Identitas Nasional dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 1(2), 111–123.
- Fierna, M., Lusie Putri, J., Fernanda, P., Studi, P., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., & Pamulang, U. (2023). Implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membentuk Jiwa Berbhineka Global Peserta Didik. *JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(2), 90-95.
- Haryanto, R., & Kurnia, H. (2023). Pengaruh Implementasi Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa SMP Bina Jaya Banguntapan Yogyakarta. *JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(2), 50-62.
- Hasbullah. *Dasar-Dasat Ilmu Pendidikan*. (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1999).
- Herdiawanto Heri, Jumanta Hamdayama. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarga Negara*. PT. Gelora Aksara.
- Imas, Mursalim. (1996). *Tanya Jawab Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Penerbit Indah.
- Kaelan.2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusrahmadi, Sigit Dwi. (2007). Pentingnya Pendidikan Demokrasi dalam Mewujudkan Masyarakat Sipil (Civil Society). <https://www.scribd.com/mobile/doc/149888072/Pentingnya-Pendidikan-Demokrasi-Artikel-080207-Ab>.





- Najib, Muhamad. Dkk. (1996). *Demorasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta: LKPSM
- Nasiwan. (2004). "Pendidikan Politik Bagi Para Pemilih Menyongsong Pemilu 2004". *Informasi, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, No. I Tahun XXX, 2004.
- Nurhayati, D., Winarno, & Nuryadi, H. M. (2023). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo. *JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(2), 80–89.
- Nurhuda, Aji. (2014). Pentingnya Pendidikan Demokrasi pada Generasi Muda. [https://www.academia.edu/9708488/MAKALAH\\_PENTINGNYA\\_PENDIDIKAN\\_DEMOKRASI\\_PADA\\_GENERASI\\_MUDA\\_Disusun\\_untuk\\_memenuhi\\_salah\\_satu\\_tugas\\_Mata\\_Kuliah\\_Pendidikan\\_Kewarganegaraan\\_](https://www.academia.edu/9708488/MAKALAH_PENTINGNYA_PENDIDIKAN_DEMOKRASI_PADA_GENERASI_MUDA_Disusun_untuk_memenuhi_salah_satu_tugas_Mata_Kuliah_Pendidikan_Kewarganegaraan_).
- Oktaviani, D., Wasesa, A., Gusti Victoria, T., Sholihin, A., & Cokroaminoto Yogyakarta SMA Negeri, U. (2023). *Membentuk Kedisiplinan Peserta Didik Melalui Mata Pelajaran Ppkn SMA Negeri 7 Yogyakarta*. 1(2), 73–79.
- Prasetyo, Antonius Galih. (2012). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Menuju Demokrasi Rasional*. ISSN 1410-4946, vol 16.
- Rachmawaty Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, S., & Rachmawaty, S. (2023). Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Penerus Bangsa. In *JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik* (Vol. 1, Issue 1). <https://kurniajurnal.com/index.php/jpkp/article/view/4>
- Rosit, S. M., Fierna, D. M., & Putri, J. L. (2023). Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 1(1), 1–10.
- Saputra, Bayu Chendi. (2013). Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. <http://b4iu.blogspot.co.id/2013/04/demokrasi-dan-pendidikan-demokrasi-di.html>.
- Setiawan, Deny. (2015). *Kapita Selekta Kewarganegaraan*. Medan. Larispa Indonesia.
- Sion, P., & Rustandi, R. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik Di SMK Letris Indonesian 1 Tangerang Selatan. *JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(1), 18–33.
- Sonia, Putri. Rustandi, Roni. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik Di SMK Letris Indonesia 1 Tangerang Selatan. *JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 18-33. DOI: 10.61476/xmxt8m27
- SusantI, E. (2022). "Pendidikan Kewarganegaraan", (Cahaya Firdaus)
- Syarbaini Syahril. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ubaidillah, Ahmad. Abdul Rozak Dkk. (2000). *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*. IAIN Jakarta Press: Jakarta.
- Wens, Tanlain. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1992).
- Winarno. (2014). *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



Yumitro, Gonda. (2013). Jurnal ilmu sosial dan politik: *Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*. ISSN 1410-4946. vol 17.

SusantI, E. (2022). “Pendidikan Kewarganegaraan”, (Cahaya Firdaus).